



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI V**

Tahun Sidang : 2014 - 2019
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Hari, Tanggal : Rabu, Tanggal 16 Januari 2019
Pukul : 14.00 WIB sd selesai
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Ir. H. Sigit Sosiantomo, Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Sekretaris Rapat : , Kabagset Komisi V DPR RI
Tempat : R.Rapat Komisi V DPR RI (KK V)
Acara : Membahas mengenai Permasalahan Penyelesaian
Pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang - Jawa Barat

Anggota Yang Hadir : **PIMPINAN**
1. Ir. Fary Djemy Francis, MMA
2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
3.

ANGGOTA
FRAKSI PDI- PERJUANGAN

- 1.
- 2.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Drs. Hamka Baco Kady, MS
2. H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, ST
- 3.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Ir. H. Bambang Haryo Soekartono

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

1. Drh. Jhoni Allen Marbun, MM
- 2.

FRAKSI PARTAI AMAMAT NASIONAL

- 1.
- 2.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 1.
- 2.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I
- 2.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- 1.
- 2.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

- 1.
- 2.

FRAKSI PARTAI HANURA

- 1.
- 2.

A. ANGGOTA KOMISI V DPR RI

.... Anggota izin

B. PEMERINTAH

1. Dirjen Perhubungan laut
- 2.

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Yth Mitra kerja Komisi V, marilah kita bersyukur pada Allah swt, yang dengan rahmatnya kita semua bisa bertemu berkumpul disini untuk melaksanakan tugas tugas konstitusional kita melayani masyarakat, menerima pengaduan masyarakat dan kemudian kita mem *follow up* pengaduan masyarakat itu untuk menjadi sebuah kebijakan strategis yang benar.

Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi berdasarkan informasi dari Sekretariat, hadir sekitar.. hampir 10 anggota DPR mewakili 4 fraksi ya kita masih menunggu temen temen dari fraksi lainnya dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 246 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Bapak Dirjen dan Anggota Komisi V yang kami banggakan, kami ingin mereview ulang bahwa komisi V pada tanggal 21 sd 22 September 2018 yang lalu telah melakukan kunjungan spesifik untuk meninjau rencana pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi V sangat menyesalkan atas ketidak hadirannya dari PSPB IPB dan pihak *Appraisal* dari pemerintah sehingga dalam kunjungan kerja spesifik tersebut, komisi V belum mendapatkan informasi data yang lengkap terkait rencana pembangunan pelabuhan Patimban khususnya, terkait dengan harga yang wajar dalam pembebasan lahan dari masyarakat setempat.

Kunjungan spesifik tersebut sebenarnya adalah berasal dari aduan kelompok masyarakat Patimban yang merasa belum puas terhadap harga yang telah

ditetapkan oleh *Appraisal* ya dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk melakukan jual beli tanah.

Nah terkait dengan hal itu komisi V, mengundang Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan menghadirkan pihak terkait, yang saya maksud pihak terkait teRuteama kemarin yang belum datang yaitu PSP3 IPB dan pihak *Appraisal* pemerintah serta dari BPN .

Untuk memperoleh penjelasan ya.. yang lebih valid terkait dengan progress dan kelanjutan Patimban pembangunan Pelabuhan Patimban, sebagaimana kita ketahui Bersama dalam kunjungan kerja spesifik pada bulan September 2018. Pemerintah sudah menetapkan tenggat waktu operasi dari pelabuhan Patimban itu Juni bulan Juni 2019 ya, dan sekarang kita sudah memasuki bulan pertengahan bulan Januari 2019. saya kira DPR merasa penting untuk mempercepat proses pembahasan aduan masyarakat tersebut dan tentu dengan pihak pihak yang kopenten agar tidak ada kendala kendala yang menghalangi pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Patimban, karena ini adalah salah satu proyek strategis nasional.

Jadi demikian saya kira kepada Pak Dirjen Perhubungan Laut yang telah kami minta untuk menghadirkan pihak pihak terkait sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, teRuteama pihak pihak yang tidak bisa hadir saat kami melakukan kunjungan spesifik di Pelabuhan Patimban untuk bisa memberikan penjelasan ya. Yang kedua tentu mengingat waktu kami persilahkan Patimban pak dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan penjelasannya bisa juga disampaikan terkait dengan progres pelabuhan itu sekarang bagaimana. Mudah-mudahan kendala kendala yang menjadi rintangan pembangunan itu bisa kita selesaikan secara baik dan konstitusional ya dan tentu kita sangat berharap proyek strategis itu berjalan dengan baik dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menjadikan Indonesia menjadi Negara yang maju, adil dan makmur. Saya kira itu dan kepada pak Dirjen kami berikan waktu untuk memberikan penjelasan. Silahkan pak dirjen.

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT (Ir. R. AGUS H. PURNOMO):

Terima kasih,

Selamat siang,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua, bapak bapak Pimpinan Komisi V, bapak bapak anggota Komisi V dan ibu yang saya hormati,

Jadi kami ini datang dari Perhubungan Laut lengkap, Dirjen ada Direktur Kepelabuhanan, kawan kawan dari PP KPA, kemudian dari BPN hadir mohon maaf memang yang dari PSP3 IPB sudah kami sudah beritahu, tapi sampai sekarang tidak *cornfirm* hadir yah kalau dari team operational sudah sesuai dengan yang, saya waktu itu hadirnya terlambat.

Bapak bapakdari pekerjaan/Ibu sekalian, kami akan menyampaikan secara ringkas bagaimana sampai sekarang progress dari pekerjaan Patimban, jadi sebagai informasi awal bahwa Pelabuhan Patimban ini terletak di Jawa Barat, yang merupakan proyek Strategis Nasional sesuai dengan Surat Wakil Presiden Tahun 2015 kemudian ada lagi percepatan Operasional Patimban harusnya tadi seperti disampaikan Bapak Pimpinan, harusnya sudah pada bulan Juni 2019 ini akan *soft opening* tapi ini tampaknya berbagai kendala akan sedikit mundur kemudian dana dari proyek ini seluruhnya adalah hampir seluruhnya menggunakan lun dari Jepang.

Khusus mengenai tanah ini hasil dari KJPP yang sudah diselesaikan maka kebutuhan tanah untuk Patimban yaitu akses Rute dan *Back up* Area ini sebesar 863 M Rupiah dana sudah tersedia pada Tahun lalu sampai 500 M, kemudian Tahun ini sudah dianggarkan lagi sebesar 363 sehingga perlu dana untuk mengadaan tanah sudah siap. Kemudian status mengadaan tanah untuk akses *Rute* jalan masuk dari luar area pelabuhan sampai dengan dalam pelabuhan ini total dari jumlah 121 bidang tanah ini 81 bidang sudah dibayarkan kemudian 39 bidang dalam proses pembayaran oleh Lembaga LMAN. Jadi memang proyek ini agak spesifik bahwa pembayaran seluruh pengadaan lahan oleh LMAN langsung, jadi tidak oleh kami tapi oleh LMAN langsung, kemudian satu bidang tanah dikonsinyasi, sedangkan 24 bidang tanah non warga terdiri dari satu bidang milik Kementerian Pertanian kemudian 6 bidang milik Kementerian PUPR, 3 bidang milik Pemerintah Desa, satu tanah wakaf, 7 bidang jalan, dan 6 selokan.

Kemudian selain itu untuk pengadaan tanah di *back Up* area, jadi *Back Up* area ini kira kira diperlukan sekitar 380 hektar itu terdiri dari 181 bidang tanah warga yang sudah dimusyawarahkan dan kemudian 66 bidang sudah dibayarkan, kemudian 66 bidang lagi sudah di LMAN untuk dibayarkan ada 3 bidang belum setuju untuk diganti, kemudian 15 bidang masih belum berani keputusan, kemudian ada 33 bidang lagi yang masih mereka mengumpulkan data datanya ada perbedaan nama, KK dan sebagainya.

Kemudian ada 3 bidang tanah milik Perusahaan PT Laksana, kemudian ada 32 bidang lagi milik Pemerintah Daerah, kemudian ada milik PUPR, tanah wakaf dan desa dan tanah selokan.

Bapak/Ibu sekalian para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, Sebagai upaya tindaklanjut atas permasalahan lahan tersebut, kami telah melakukan langkah langkah: yang pertama

1. Progress tukar menukar tanah kas desa, jadi untuk umpama bagaimana saat ini telah dilakukannya musyawarah terkait pemenuhan syarat permohonan wakaf guna proses risalah wakaf dan dilanjutnya telah diajukan permohonan ijin kepada Bupati Subang. Kemudian yang ke
2. Progress pengadaan tanah hibah, pemuda Subang telah diterbitkan Ijin Pembangunan lahan Milik Pemda Subang dan tanah Pemda tersebut telah diserahkan untuk pembangunan lahan setaraf tadinya Kementerian Perhubungan agar segera mengajukan permohonan hibah masuk ke Dirjen Perbendaharaan Kementerian perhubungan jadi tanah yang dari Pemda sudah *clear* semua, kemudian untuk ada lagi tanah milik falet Pengkajian Tehnologi Pertanian, ini telah ditindaklanjuti dengan surat Kementerian Perhubungan 4 Desember 2018 perihal permohonan Alih Status Tanah kepada Kementerian Perhubungan.

Secara terperinci telah kami sajikan terkait tindaklanjut usulan program kegiatan, dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat, sebagaimana yang ada kami terangkan di *slide* disana.

Bapak/Ibu sekalian,

Jadi secara singkat itu penjelasan kami tentang pengadaan tanah Patimban, sebenarnya kalau dari segi secara regulasi pengadaan tanah sudah sesuai dengan progress yang ada yaitu dengan cara *facial* yang independen sudah dilaksanakan, namun tadi dari ada pendapat dari PSP3 IPB yang memang waktu itu menjadikan jalan, tapi Alhamdulillah sekarang yang dari seluruh masalah tanah hanya beberapa bidang yang tadi dalam proses dan Insya Allah bisa disesuaikan.

Kalau dari segi progres pekerjaan kami akan laporkan secara ringkas bahwa Pembangunan sekarang sudah berjalan di laut karena ini memang pembangunannya di laut

Jadi sudah ada pekerjaan *Trigging* kemudian CDM yang lain lain bisa jalan, memang agak mundur sedikit progresnya tapi Insya Allah untuk Tahun ini bisa nanti tahap terkenal bisa *soft opening*, secara singkat itu yang saya sampaikan terkait dengan kunjungan Komisi V waktu itu kesana, terima kasih mohon masukan dan arahan,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirjen, teman teman Anggota Komisi V yang kami banggakan.

Saya ingin me *review* ulang beberapa pertemuan sudah kita lakukan. Yang pertama, Rapat kerja kita kali ini, RDP kita kali ini sebetulnya berawal pada audiens yang dilakukan pada tanggal 17 September 2018, dimana ada kelompok masyarakat yaitu Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban meminta untuk melakukan Audiens dengan Komisi V DPR RI dan diterima oleh Pimpinan dan 5 orang Anggota DPR RI Komisi V, terkait panyampaian aspirasi pembebasan lahan pertanian untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Ringkasan dari aspirasi mereka adalah bahwa:

1. Ada anggapan dan sikap Petani Pemilik Lahan terdampak proyek Pelabuhan Patimban yang secara umum para petani pemilik lahan yang terdampak sangat mendukung, apabila harga ganti rugi pembebasan lahan layak, adil dan mensejahterakan warga serta berharap adanya Pelabuhan Patimban akan memberikan dampak yang positif. itu yang pertama, yang kedua
2. Sebagian warga pemilik lahan terdampak, menolak harga ganti rugi lahan yang menuRute mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh warga dan itu didukung dengan masukan dari PSP3 (Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB) yang meminta, yang diminta oleh mereka untuk memberikan Advokasi terhadap permasalahan Petani Patimban yang lahannya terdampak Pelabuhan Internasional Patimban. Kemudian yang keempat
3. Masyarakat melakukan demonstrasi dan mendapatkan respon oleh Pemerintah pada bulan Mei, aksi demonstrasi didepan Kantor Kecamatan Pusakanegara, kemudian tanggal 22 Mei aksi demonstrasi didepan Kantor kecamatan Pusakanegara dan aksi demonstrasi 28 Mei di Gedung Ombudsman RI, dilanjutkan ke Gedung DPR.

Itu yang melatar belakangi pertemuan kita ini pada umumnya tuntutan pemilik lahan adalah mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan harapan mereka, harapan mereka itu tadi diatas *Appraisal* yang ditentukan oleh *Appraisal* Pemerintah. Kemudian pada akhirnya masyarakat juga meminta agar ada pelaksanaan SOP dalam pembebasan lahan. Mereka merasa ada pelanggaran SOP yang terkait dengan proses amdal, kemudian warga terdampak dipersulit untuk mengurus status kepemilikan baik HGB maupun Sertifikat. Dan seterusnya terjadi intimidasi dari oknum polisi dan seterusnya BPN Subang tidak mengumumkan hasil ukur komplain warga, hasil ukur yang kedua BPN Subang dan *Tim Appraisal* menetapkan harga tanah tanpa proses musyawarah. Itu apa namanya keluhan keluhan yang disampaikan mereka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V beberapa waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya pada tanggal 21 September 2018, Komosi V

melakukan peninjauan lapangan, nah disaat peninjauan lapangan ini Komisi V merasa kesulitan untuk melakukan konfirmasi terhadap protes protes yang dilakukan oleh masyarakat, karena yang melakukan advokasi terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh *Appraisal* adalah pihak PSP3 IPB dan tidak hadir sih di lapangan. Kemudian pihak *Appraisal* Pemerintah pertemuan itu juga tidak hadir, tetapi dari hasil peninjauan lapangan komisi V menemukan bahwa warga Subang mendukung Pelabuhan Patimban itu dan berharap dapat diikutsertakan dalam pembangunan pelabuhan Patimban, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi mereka.

Walaupun beberapa warga masih menolak harga ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, oleh karena itu akhirnya saat kunjungan lapangan itu kami merekomendasikan untuk mengundang PSP3 IPB, kemudian *Appraisal* Pemerintah pada pertemuan kita kali ini, untuk kita dapat mencari *win win solution* terhadap keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat.

Selanjutnya komisi V mendukung penuh pembanguna Pelabuhan Patimban dan berharap agar dengan pembangunan Pelabuhan Patimban ini dapat menjadi alternatif bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priuk dan bisa menjadi sarana dari pengembangan daerah.

Saya kira ini apa Namanya kronologis dan kita Sekarang sudah sampai pada akhir kayaknya sepertinya Pimpinan Rapat dengan ijin Anggota komisi V berharap pada malam ini kita ambil sebuah *komunike* atau *statemants* yang jelas bahwa kita sudah melakukan RDP dengan masyarakat, kita juga sudah melakukan kunjungan ke lokasi, dan kita juga sekarang melakukan pertemuan lagi yang ketiga dan kita tidak mendapatkan konfirmasi kejelasan karena tidak hadirnya pihak pihak yang terkait dengan permasalahan lahan tersebut. Jadi kami berharap tentu DPR melalui Rapat RDP kita kali ini bisa mengambil keputusan yang tegas bahwa kita sudah menampung aspirasi masyarakat, kita sudah lakukan upaya mediasi yang baik dan hasilnya adalah abcd, saya kira abcd nya nanti kami serahkan kepada teman teman Anggota Komis V apa yang musti kita *statement* kan atau bunyikan dalam keputusan itu pada sore, siang, sore hari ini. saya kira demikian pengantar dari Pimpinan selanjutnya Kami persilahkan kepada Anggota dan Ketua Komisi V untuk bisa memberikan pencerahannya khususnya pak Daniel yang tetangga Dapil, sebetulnya kalau ada yang punya Dapil mas siapa namanya Nurhasan Zaidi, Pak Nurhasan Zaidi tetapi saya kira tetangga Dapil perlu kita dahulukan sebelum yang lain lain temen temen dari Komisi V, kami persilahkan kepada Anggota Pak Bambang Haryo, kami persilahkan

Bapak-bapak anggota Komisi V hari ini kita, hari ini merupakan hari bahagia bagi kita semua Anggota Komisi V, karena pada hari ini 56 tahun yang lalu lahirlah seorang jabang bayi yang luar biasa, yang luar biasa garang di Komisi V mewarnai arah pembahasan berbagai hal yang strategis di Komisi V, jabang bayi itu namanya Bambang Haryo, Sukartono, begitu ya kita ucapkan selamat Ulang Tahun kepada Pak Bambang, terima kasih.

Saya kira itu yang bisa dilaporkan oleh pimpinan selanjutnya kepada Anggota, Mas Bambang silahkan pak Bambang, silahkan Pak Daniel silahkan.

F-GOLKAR (H. DANIEL MUTAQIEN SYAFIUDDIN, ST):

Terima kasih Pimpinan,

Tetangga Dapil Pak Ketua,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Yang saya hormati, Pimpinan Komisi V, beserta jajaran Anggota, kemudian pak Dirjen beserta jajarannya, saya hormati dan saya banggakan,

Kebetulan saya bukan Dapil Subang pak, tetapi saya tetangga sebelahnya, saya Dapil Jabar VIII saya dari Indramayu Cirebon, dan pada saat kunjungan yang lalu, juga saya dengan pak Sigit dengan Pimpinan Komisi V juga hadir di Patimban. Saya pikir seperti ini pak, apa Namanya kita di DPR menjalankan fungsi kita sebagai aspirasi, tempat aspirasinya masyarakat dan kita juga sudah menjalankan fungsi-fungsi kita dan kita sudah hadir ke Patimban dan keberadaan Pelabuhan ini kan memang sudah sangat lama direncanakan dari Cilamaya kemudian geser lagi ke Patimban kemudian sekarang ada permasalahan, hal yang menjadi prinsip menuRute saya secara pribadi ketika prosedur semua sudah dilakukan dari *appraisal* kemudian semua sudah dilakukannya karena prosesnya sudah terlalu Panjang kita lanjut saja pak, tidak ada hal mendasar yang bisa menghambat adanya Pelabuhan Patimban di wilayah Subang ini. Saya secara pribadi sangat mendukung sekali, karena pasti akan sangat berefek sangat banyak juga terhadap wilayah Dapil, yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu dan sekitarnya.

Hanya satu hal yang jadi permasalahan dan tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Dirjen keterkaitan efek soial yang lain pak, bukan hanya permasalahan pembebasan lahan atau keberadaan adanya Pelabuhan di Patimban tersebut. Patimban ini kan wilayahnya Tanjung pak, ada lekukan biasanya disana itu ada beberapa nelayan nelayan kecil yang mencari ikan. Nelayan yang biasa beroperasi di wilayah Patimban, keberadaan Pot keberadaan Pelabuhan ini jelas mempengaruhi banyak terhadap nelayan nelayan yang biasa mencari nafkah di wilayah sana. Kebetulan kalau nelayannya itu di wilayah Dapil saya pak, ada di wilayah Sukahaji, kemudian Ujunggebang, di wilayah Kecamatan Sukra, Kecamatan Patrol, mayoritas adalah wilayah dari kabupaten Indramayu, Keberadaan ini sangat jelas mempengaruhi mata pencaharian mereka, ini juga yang harus dipikirkan mereka dan ini juga harus dipikirkan juga oleh Bapak-bapak sekalian mengenai tindaklanjut keberlangsungan para nelayan kecil ini teRuteama nelayan kecil pak, karena yang nelayan kecil yang sehari berangkat kemudian kembali lagi ke rumah itu bukan nelayan nelayan besar yang diatas 30 jt ini hanya paling sekitar 5 sampai 3 sampai 5 jt, perahu perahu kecil ini harus dipikirkan.

Barangkali memang ada disosialisasi dari pihak Menkom maupun dari Perhubungan laut yang bisa mensosialisasikan kesana. Apa jaminan kepada mereka ketika Pelabuhan ini ada juga, inikan keberadaan Pelabuhan ini pasti akan sangat memberikan manfaat termasuk juga pada nelayan nelayan itu yang kehilangan pekerjaan itu. Jadi efeknya memang harus bisa kemana mana, Bapak juga saya kami mohon dari pihak Perhubungan Laut, atau Komenfo atau siapapun bisa turun dengan saya kapan waktunya nanti akan saya informasikan ke bapak untuk bisa memberikan kepastian kepada mereka bahwa dengan adanya ini juga mereka tidak dirugikan itu mereka juga bisa, masih bisa memberikan apa mencari nafkah untuk karena mereka nelayan kecil pak bukan, bukan nelayan besar kalau nelayan besar tentu kita juga tidak terlalu mengkhawatirkan tidak terlalu memikirkan. Mungkin itu Pimpinan kalau secara prinsip keberadaan ini kami sangat mendukung karena waktunya sudah terlalu lama dan Panjang, kalau hal hal yang mohon maaf seperti mengada ada mencari permasalahan ini ya tentunya harus baik sajalah dan kita juga sebagai Lembaga DPR yang mewakili masyarakat kita juga sudah melakukan fungsi kita dan secara prinsip memang tidak ada permasalahan yang berarti, Terima kasih Pimpinan, Wabillahi taufik Walhidayah,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Pak Daniel, silahkan pak Hamka

F- GOLKAR (Drs. HAMKA BACO KADY, MS)

Terima kasih Pimpinan,

Saya hanya menyarankan begini pertama persoalan ini sebenarnya persoalan umum dilakukan apabila kita melakukan pembebasan lahan, bukan pada sektor kelautan saja jalan, jembatan dan sebagainya, tetapi prosedur kita sudah lakukan pak Ketua, sebagai Lembaga Rakyat menerima aspirasi. kesimpulan saya, saya mendukung Pak Daniel, *inpresif* bahwa kalau ada yang protes adakan aturan mainnya silahkan majukan ke Pengadilan dan uang ganti ruginya itu ditiip di Pengadilan. Ya ini di daerah saya irigasi begitu besar juga, trilyunan ya selesai juga masalahnya. Oleh karena ini jangan sampai terhambat, terhambat pembangunan ini lebih bagus kita apalagi yang namanya *Appraisal* ini independent, mungkin lintas Instansi mungkin saya tidak tahu persis. Nah dan sayangnya sudah berapa kali persoalan pembebasan lahan ini, tidak pernah hadir yang Namanya *Tim Appraisal* saya ingat persis diruangan ini juga pada waktu masalah pembebasan di Karalloe, di Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi selatan. persis sama pak, ga datang juga pak, mungkin pak Dirjen pasti kesulitan di dalam mendatangkan pasti kesulitan. Nah oleh karena itu kalau saya kita *streak* aja pada aturan yang ada, bagi yang protes silahkan ajukan ke proses pengadilan gitu loh, dan bagi pelaksanaan proyek ini ganti ruginya yah ditiip ke pengadilan kan ada batas waktunya gitu loh. Ya sehingga ini jangan sampai ini proyek strategis Nasional ini tidak berjalan dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Saya kira itu pak Ketua, sebenarnya saya tidak bisa hadir di ruangan ini karena saya sementara Sosialisasi P4 karena saya anggap penting, bukan 5 Pilar tapi 4 Pilar saya anggap penting ini, sudah naik 5 kalau bisa naikan jadi 6 aja pak, saya kira itu Pimpinan, karena kalau semua kita harus me... yang penting sudah lalui pengaduan rakyat kita terima dan kita sudah melakukannya dengan baik dan mempertemukan. Saya kira demikian pak Ketua, terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Saya kasih waktu kepada Pak Nuhasan Zaidi, yang punya Dapil

F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I):

Yah Terima kasih,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Saya maaf datang terlambat, merasa berkewajiban harus hadir sesuai arahan Ketua, terima kasih teman teman juga hadir dalam perhatian Patimban, Pimpinan pak Ketua ma kasih, ini Patimban ini pak ringkasnya begini pak, saya di Dapil saya Subang, ini saya sudah setiap ketemu orang disekitar Pantura itu kita coba dialog. Tapi inti isunya ini masalah pergantian tanah, saya belum pelajari secara detail secara keseluruhan cuman inti masalah disitu, ini kan istilah ganti rugi ini sudah terlanjur istilah pakai ganti rugi ganti untunglah atau ganti wajar, itu yah, ya pak jadi ganti wajar jadi gini pak ini kita juga sosialisasikan kebawah bahwa pembangunan Patimban ini pembangunannya akan berefek kesejahteraan masyarakat sekitar bahkan Nasional gitu pak, kita coba masyarakat prinsipnya mendengar dengan baik, kadang kadang ada satu dua yang isenglah. Tapi itu bisa diredam sebenarnya kalau kita berkomunikasi dengan baik, cuman ini saya usul begini pak ini kan NJOP- nya ini kan rendah pak, memang disitu tuh hasil Analisa harga tanah itu jelas harganya itu sekitar 270 - 300. Memang ada Analisa dari Independen 700 sekian tapi itupun analisisnya memang tidak obyektif yah, dia berdasarkan kebutuhan kesejahteraan masyarakat sekitar saat itu bukan faktor obyektifitas penilaian tanah. Tapi persoalannya begini pak harga 270 itu sampai 300 paling tinggi 280 ini masalah apa, tanah disekitar itu sudah gak bisa beli tanah lagi, karena isunya sudah daerah metro, daerah yang akan menjadi sebuah kota besar jadi masyarakat tidak mungkin bisa beli tanah lagi dengan harga segitu. Nah artinya faktor X faktor dirupsi ini, yah situasi global yang tidak menentu local Nasional ini, ini masalah pemerintah harus mempertimbangkan. Model di Jakarta, kota Bekasi, Depok ini kan NJOP nya harga tanahnya kan belasan puluhan juta, Nah NJOP disitu dengan disituasi global yang tidak menentu itu di 270 ga mungkin dia bisa beli tanah pak, beli sawah aja ga bisa nah faktor faktor ini, karena bapak ini akan buat sebuah daerah metro subuh subuh daerah arus pelabuhan besar, jadi masyarakat juga tidak bodoh lagi pengen pinter seperti orang kota menikmati hidup, jadi tolong itu harga itu dipertimbangkan, sehingga dia bisa beli tanah. Nah ini ni catatan catatan penting faktor faktor ini yang variable disituasi yang tidak menentu. Bapak akan bikin Pelabuhan semua orang menyiapkan harga beli jual tanah untuk beli tanah tidak bisa lagi, bapak bayar 280 harga tanah 700, 600 minimal. Kita sudah tanya ini semua faktor ini pak beda pak pimpinan maaf kalau orang Dapil ini semangat ngomong kadang kadang ga rasional tapi ini memang situasi ini tidak rasional, situasi global ini, terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT F- PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Minta tolong Sekretariat diulangi biar ini, OK kita lanjut Pak Jhoni, Pak Ridwan P kalau ada yang disampaikan, silahkan

Silahkan Pak Jhoni,

F-DEMOKRAT (Drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

**Eksekutif dan para Undangan lain yang terhormat, seluruh kita,
Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi,**

Saya kira yang pertama kalau saya lihat ya pemaparan ini cukup transparan ya, pemaparan ini cukup transparan artinya ini dari sini sebetulnya semua orang bisa memberikan analisis dan komentar. Kenapa ini terbuka iya toh saya kira ini cukup pemaparan ini cukup *clear* lah ya, betul kalau saya itung itung ini secara ekspres sekitar 250 sampai 300 ini bahkan ada yang 1 juta ini 80 meter 1 juta lebih berarti ini yang dipinggir jalan. tapi ini yang pertama pembangunan ini harus segera berjalan itu loh ya, dari sisi pembebasan.

Pemerintah sebenarnya terus terang saja sudah baik salah satu contoh di Bogor ya kebetulan pernah saya kena ya jalan tol iya toh, itu 12 Juta padahal harga tanah disitu kalau di ...(*everest*) 40 juta bahkan kalau butuh uang masa 6 juta, memang betul kata temen saya ini debat tebal memang, debat tebal kebetulan juga di Subang juga saya ada tanah, tahu lah dengan ..(*everest*) yang segitu sebetulnya sudah, memang susahya sebetulnya Pemerintah itu tidak diberikan ijin iya toh untuk menyiapkan tanah, mengganti tanah ditempatnya situ kan ga dibuatkan itu gitu loh. Sebetulnya kalau bisa (*diplot*) itu pindah saja iya toh. Kalau bicara soal apa fungsi tata guna tanah disana. tapi kan Pemerintah yah tu. Nah oleh karena itu memang, Pimpinan usul saya biasanya orang bisa mengkail di air keruh kasian pasti ada yang diuntungkan ada yang dirugikan, oleh karena walaupun ini pak Eksekutif tolong juga diverifikasi yang ga mau keluar jalur, tapi jangan nanti menjadi salah gunakan orang lain, kasian. saya juga pernah gitu dikonsinyasi malah orang lain yang bermain, apalagi kalau orang orang desa yang ga ngerti hukum, nah karena itu sekitar kepala kepala desa, RT, RW, supaya ini membujuk, karena biasanya terus terang aja konsinyasi menjadi timbul persoalan baru, saya terus terang aja pembebasan kanal banjir timur saya aja kena konsinyasi timbul masalah baru. Konsinyasi ini yah ini mohon maaf juga ini pengadilan juga dak gampang ini, iya toh udah dititip ga gampang ngeluarkan titipan itu. Ga gampang ngeluarin titipan ini saya ngalamin sampai sekarang yang konsinyasi sudah *clear* ga gampang ngeluarin titipan ini, sementara dari eksekutif dari pemerintah sudah selesai masalahnya. Karena nah ini perlu dibicarakan seperti itu. Nah ini harus diberikan pengertian kepada masyarakat jangan sudah ini nanti.

Ha yang kedua, ini konsinyasi ini ini tanah saya konsinyasi di 2004, bayangin aja di 2004 kanal timur ngeluarin susah itu ada aja lagi padahal dulu sudah ditetapkan(*secara lusia lusia*), dan nilainya tidak akan bertambah sementara rekening duwit itu dimana puluhan milyar disana. Nah ini juga kasian gitu lo ini saya pengalaman pengalaman begini kasian kepada orang - orang yan... memang harus jalan secara umum saya melihatnya yah transparan ya bagus tetapi juga pertimbangkan juga kalau ada satu dua yang memang biasanya ngahir tentunya ada kan kebijakan untuk supaya lebih bagus karena memang tidak mudah. Terakhir pimpinan dalam setiap pembangunan pasti ada yang diuntungkan tetapi ada juga yang dirugikan salah satu tadi, sahabat saya tadi bilang ji apa hilir daripada nelayan nelayan kecil ini, nelayan nelayan kecil ini tolong memang ini harus diwaspadai walaupun sebetulnya bukan semata mata apa tolong ini dibicarakan ini saya setuju itu, itu termasuk orang yang tidak dapat untung itu disitu, tapi kalau yang tuan tanah yang punya tanah pasti ya dapat untung iya kan, apalagi ada yang dapat untung lah apalagi kalau sisa tanah yang dibebaskan kan masih ada wah itu harganya otomatis itu yah. Otomatis punya saya juga begitu sudah dapat disini tanah saya menjadi dipinggir jalan harganya memang langsung melejit lagi memang ada yang diuntungkan ada yang dirugikan gitu loh. Oleh karena itu ya saya minta diperhatikan yang dirugikan itu, kalau yang diuntungkan itu saya kira dia hanya meminta tambah

untung tambah untung yah ga usah didengarilah, tetapi yang dirugikan itu seperti yang dihilir apa tadi penilaian kecil ini tolong dipikirkan itu supaya diberikan multi efek apa, apa bentuk apa gitu loh, apakah misalnya semacam katakanlah pembangunan kios segala macam didata segala macam apa diberikanlah apa namanya kemudahan kemudahan dengan apa, begitu Pimpinan, terima kasih pimpinan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan.

KETUA RAPAT F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Yah, baik saya kira *komprehensif* dari Pak Daniel dari Pak Hasan Zaini, Pak Hamka juga dan Pak Jhoni Allen,

Ketua, saya kira kami persilahkan kepada Pak Bambang yang punya hari baik hari ini, silahkan kalau ada apa apa.

F-GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Mohon maaf Bapak Pimpinan, pak Ketua

Bapak Pimpinan, Bapak Pimpinan Komisi V beserta para Anggota Komisi V yang sangat sangat saya hormati dan muliakan juga pak dirjen beserta jajarannya yana ada di Perhubungan Kementerian Perhubungan,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera selamat siang mohon maaf ini pak, sebenarnya permasalahan ini tidak perlu terjadi dalam arti kalau misalnya mungkin Pak Dirjen masih belum masuk disini pada waktu itu, tapi harusnya didalam pembangunan itu semuanya sudah *clear* tidak ada satu hambatan apapun pada saat saat seperti ini, karena terus terang ini juga sangat menyulitkan kita semua memang kita tidak bisa menyalahkan mereka karena terus terang sedikit masukan pak Dirjen untuk ini tidak hanya permasalahan yang ada di Patimban,tapi juga ada permasalahan yang dulu pernah terjadi di Majalengka juga Pelabuhan Kertajati.

Yang mana Pelabuhan Kartajati itu atau Bandara Kertajati itu sebenarnya adalah merupakan tanah yang maha subur, maha subur itu dia bisa menghasilkan pertanian yang luar biasa hebat pak, padinya bisa mau panen berapa kali juga bisa pak tergantung varietasnya kalau yang Thailand dia bisa 4 kali, kalau yang kita punya 3 kali dalam 1 tahun. Kita pakai 2.500 hektar jadi berarti 1 hektar itu bisa menggerus pak 8 ton padi sekali panen, jadi berarti kalau 3 kali berarti 24 ton pak sekitar kalau 2.500 berarti kita ratusan ribu ton yang hilang, ini padahal ini sangat penting untuk swasembada pangan. Dan ini tidak akan terjadi di seluruh negara di seluruh dunia. Namanya produktif dipakai untuk kepentingan infrastruktur ga boleh pak yang kami lihat di Cina pak, bapak boleh lihat di Beijing itu ditengah kota ada sawah pak, dan dimana itu ada tanah produktif dan mereka selalu dihindar dari itu, tapi ini saya terlanjur hanya sampai dengan sekarang ini hanya Bandara Kertajati masih belum dipakai, dipakai hanya satu pesawat citylink ya pak,yang disini ni petani banyak menangis iya sudah mengorbankan tanahnya, rakyat juga menangis tapi tidak digunakan, hal ini pak jangan sampai terjadi di Pelabuhan Patimban juga pak.

Kami terus terang bukannya kami pada posisi oposisi, saya juga mengatakan kalau saya sudah oposisi disini, saya bukan petugas partai tapi saya adalah petugas rakyat pak, dan saya harus menyuarkan rakyat pak.

Kami sudah menyelidiki yang ada ditempat bapak akan membangun itu, itu adalah tempat walaupun itu bukan Dapil kami, itu adalah tempat pariwisata pak yang dimiliki oleh masyarakat wilayah sekitar disitu ataupun sampai dekatnya Lembang kalau mereka mau bermain di laut, termasuk sopir saya yang ada di Jakarta itu adalah disana pak.

Jadi pariwisata itu sekarang sudah mulai ramai kalau bapak boleh lihat dan ini tentu bisa mendatangkan devisa yang luar biasa besar, ha kami karena ini sudah merupakan suatu proyek yang sudah direncanakan cukup jauh hari pak ya, walaupun memang kita butuh deviasi daripada industri yang biasa dibawa ke Jakarta, walaupun Jakarta masih *over supply* dari sisi kapasitas peti kemas pak, karena bapak sudah membangun ± sekitar 11,5 juta... (plus) yang dimana saat ini baru berkisar 5 juta plus dan pertumbuhan rata rata pak adalah 4,72% setiap tahun kalau kita hitung sampai kira kira 45 tahun atau mendekati 50 tahu tidak mengalami *over dimand* atau kekurangan *supply*.

Jadi disini kami siap mendukung ini pak, tapi ini mungkin perlu dipikirkan juga pak produktifitas yang ada jangan sampai seperti Kertajati harus dipikirkan produktivitas itu dari 7 juta plus yang bapak rencanakan itu, bapak dapatkan dari mana karena ini pakai uang Negara, uang rakyat, yang tidak boleh dibuang buang, saya minta untuk segera dihitung dilakukan *research* litbangnya dihidupkan pak karena litbangnya anggarannya sangat kecil dihidupkan, untuk kita minta agar jangan sampai ini tidak bermanfaat karena tadi kita menggerus tanah yang sangat produktif tanah disana sangat subur dan kita menggerus wilayah pariwisata yang menjadi aduh anak anak kecil ini nanti mau kemana pariwisata mereka. Akan lebih jauh lagi saya mohon betul betul jadi dipikirkan untuk hal itu, untuk masalah dukungan komisi V tadi juga semuanya sangat mendukung dan ini sudah terlanjut terjadi, dan saya juga jangan sampai seperti halnya infrastruktur yang kita bangun tapi duitnya sudah habis dulu sebelum infrastruktur itu selesai. Tanya proyek kita adalah seperti itu. Jadi ini yang saya mohon pak Dirjen dan saya juga ingin mohon tanya sebenarnya dari pekerjaan pronsentase kan ada 3 wilayah pak, sebenarnya yang bapak akan lakukan, satu adalah wilayah laut, tentu bapak melakukan tadi yang dikatakan *trigging*, reklamasi dan lain lain. Karena ini harus membangun trastol yang sanagat Panjang karena membutuhkan kedalaman yang sangat dalam ini sudah berapa persen karena saya melihat sudah berjalan waktunya ini cukup lama kalau mulai Agustus kita melakukan *trigging* dan sebagainya,

Trus yang kedua, permasalahan yang ada di kepelabuhanan atau terminal itu bapak sudah berapa persen dan yang terakhir, adalah permasalahan akses infrastruktur untuk menghubungkan ke *intermoda* lainnya, karena ini penting sudah berapa persen jangan sampai ini sudah jadi itunya belum, itunya sudah jadi itu belum, ini seperti yang terjadi di Kereta Api Solo pak, infra sudah membuat, jamannya bapak iya toh keretanya ga jadi kira kira awal Februari, jadi pak keretanya, freonnya belum dibangun sampai sekarang pak, yang hancur ini ga bisa pak sama dengan yang sudah direncanakan juga kereta api juga pak, listrik pembangkit listrik kereta api komuter yang ada ini mohon maaf ini sampai keluar jalur komuter tahun 2015 yang tiang pancangnya.... Jadi nih jangan sampai terjadi permasalahan ini yang akhirnya nyusahkan dari pada Kementerian Keuangan, Kementerian apa itu Bappenas karena tidak ada satu perencanaan yang baik, jadi itu yang kami sampaikan pak dirjen, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):

Baik terima kasih Pak Bambang, pak Sigit ini sedang Rapim sebentar pak di Pimpinan Komisi, Pimpinan DPR pak, jadi saya lanjut. Dari pada ini saya kira apa yang disampaikan seluruh Anggota itu sudah *clear*, sebagaimana awal dan kita menerima audiensi itu secara prinsip bahwa masyarakat juga sudah siap untuk memberikan dukungan *full* terhadap Pembangunan Patimban tidak ada yang menolak, tidak ada yang menolak, jadi kita juga semua Komisi V memberikan dukungan dengan beberapa catatan-catatan disampaikan oleh para anggota.

Yang kedua, kalau kita akhirnya melanjutkan dari hasil Audiensi kita kunjungan kerja ke Patimban, pak Dirjen juga ada dan semua Tim kita dan dikemudian hari ini Rapat Dengar Pendapat lagi, itu karena kita ingin mau agar informasi langsung dari Tim *Appraisal* itu bisa kita dapatkan, Tapi hari ini Tim *Appraisal* tidak dapat hadir, sebenarnya persoalan Patimban ini adalah persoalan yang kita hadapi cukup banyak di kasus-kasus, banyak di kasus-kasus lain, bukan hanya di Pak Kementerian Perhubungan tapi juga di Kementerian PUPR, Kementerian biasa Daerah Tertinggal, nah untuk itu maka tadi sudah saya sampaikan kalau teman-teman Komisi V setuju, saya kira kita perlu melakukan Rapat gabungan dengan Komisi II pak, dan kalau bisa dipimpin oleh Pimpinan karena ini bukan hanya persoalan Patimban tapi banyak persoalan-persoalan dari apa namanya usul-saran dari masyarakat berkaitan dengan kasus dana, jadi memang hari ini juga kita tidak bisa ambil keputusan ya secara strategis, karena kita tidak yang kita harapkan datang untuk menjelaskan juga tidak hadir, jadi Anggota semua sudah sampaikan pak dirjen mungkin respon merepon cepat saja, khususnya beberapa input masukan mungkin dari dari Pertanahan Pak, ya mungkin ada sesuatu mau yang disampaikan kami beri kesempatan juga dan kemudian kita ambil kesimpulan-kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini.

Silahkan pak dirjen, atau dari Pertanahan dulu, silahkan pak

KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

Baik, terima kasih,

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Yang Saya Hormati Bapak Pimpinan Komisi V, Bapak-Bapak Anggota Komisi V, ijinkan kami dari kanwil BPN Provinsi Jawa Barat menyampaikan pak, tadi pak Dirjen sudah menyampaikan laporan progress pengadaan tanahnya, nah terkait dengan pengadaan tanah di Patimban ini pak yang untuk, ada dua area besar yang pertama Akses *Rute* atau jalan masuk ke Pelabuhan yang kedua adalah *back up* an Area atau area Pelabuhannya, untuk Akses *Rute* ini tinggal satu bidang lagi yang belum kita selesaikan karena tidak diketahui kepemilikannya dan kita akan konsinyasikan ke Pengadilan, sedangkan *Back up* Area, area Pelabuhan jadi Area yang paling besar ini masih terdapat 244 bidang tanah yang masyarakatnya belum memberikan dokumen yang lengkap, nah inilah kelompok yang menamakan diri paguyuban pak, sebagian besar ini. Nah ini kami memang karena ini sedang ditangani di komisi V jadi kami juga dilapangan menunggu dulu bagaimana hasil kita. Kalau kita hari ini mungkin ada keputusan untuk melanjutkan proses, maka terhadap 244 ini nanti akan kita lanjutkan sesuai mekanisme pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang 2/2012 pak. Dihitung terkait dengan proses ini jadi kalau berjalannya yang sudah kita lakukan selama ini semua kegiatan pendataan kita sudah kita diumumkan di desa, baik itu subyeknya obyeknya kita umumkan di desa

juga, semua bidang ini sudah di *appraisal* juga sudah dinilai oleh *appraisal independent*. Sudah dinilai jadi kita tinggal masuk ketahap musyawarah sebenarnya, akan tetapi berapa ini mereka belum menyerahkan dokumen secara lengkap, dan kami belum bisa menindaklanjuti karena dokumen dokumen ini nantinya akan divalidasi di *review* oleh BPKP pak. Ini kalau BK ga lengkap nanti akan kita juga ga bisa bayar juga nantinya, jadi kami memang menunggu beberapa masyarakat ini untuk menyerahkan dokumen kelengkapan atas haknya wargaarganya. Tetapi kalau mereka kita ga bisa menunggu terlalu lama pak, kan Undang-Undang menentukan waktu juga dari pengadaan tanah, nah pada saat itu juga kita disini kita bisa memutuskan ini akan dilanjutkan prosesnya mungkin kami juga akan meneruskan melanjutkan sesuai mekanisme Undang Undang 2/2012, seperti tadi disampaikan kita bisa menempuh dengan cara konsinyasi tapi tadi dari pak Jhoni menyampaikan sebaiknya jangan konsinyasi dulu kita akan dilakukan pendekatan dulu, itu saya pikir itu sangat bijak sekali kita juga akan minta bantuan dari bapak kepala desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman lagi kepada masyarakat, untuk kita supaya nanti kita pendekatan jadi jangan sampai konsinyasi kasian mereka terlalu jauh ke pengadilan, kami sangat mengharapkan bahwa pembayaran nilai ganti kerugian ini bisa langsung untuk pada pemilik tanah seperti itu, kita lebih baik juga seperti itu jadi masyarakat bisa langsung menerima uangnya dan bisa langsung dipergunakan keperluan mereka. Nah tadi disampaikan bahwa ada disparasi harga yang cukup jauh antara nilai UGRnya ke mereka terima dengan nilai saat ini. Nah inilah terkadang jangka waktu yang pembayaran yang terlalu lama tadi pada mereka menunda - nunda kita belum bisa bayar, kalau mereka dari pada saat itu kita semuanya langsung bisa bayarkan mereka tidak bisa langsung tanah pengganti pada saat itu. Tapi penundaan - penundaan ini berakibat juga akhirnya sekarang harga tanah disekitar mereka mungkin juga sudah inggi juga seperti itu, karena waktu yang apa mereka menunda nunda untuk persetujuan nilai ini, tapi untuk beberapa masyarakat yang sudah menerima pembayaran mereka sudah bisa melakukan mencari lahan pengganti untuk area mereka baik itu rumah maupun untuk lahan pertanian.

Jadi kami mungkin mengharapkan mudah mudahan sore ini kita tadi komitmen kami terima kasih kepada pak Ketua, Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V tadi memberikan support dan dukungan terhadap kegiatan ini dan menyarankan untuk kegiatan pengadaan tanah ini bisa dilanjutkan, kami sangat terima kasih pak, dan mudah mudahan ini akan jadi pedoman kami untuk meneruskan proses pengadaan tanah ini, kita tinggal yang belum di *back up* aja tinggal kelompok masyarakat yang mengajukan pengaduan ke DPR ini, demikian pak terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,

F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I)

Pak Ketua, bisa tanggapi,

yah ma kasih tanggapannya.

Kan begini itu Pantura ini masih belum pulih efek dari Cipali, masih belum pulih pak, kan bapak lihat juga kan warung di sekitarnya banyak warung yang aneh aneh pak, itu kan bukan persoalan akhlak moral aqidah saja mereka itu masalah ekonomi pak, kita ga bisa bahas ini pak, warung remang - remang itu kanan kiri Pantura sepanjang makin banyak pak, itu bukan persoalan mereka ga ngerti, ga

ngerti syariat atau hukum, kita ekonomi pak makanya dalam agama Islam juga gitu yang begitu tuh pak secara masyarakat ga bisa dibasmi, kalau kita belum memberikan solusi secara integral bukan persoalan dikita dakwahi kita ceramahi, tapi ekonominya perutnya juga diselesaikan main babat habis saja pak.

Nah itu satu efek Cipali itu, warung warung yang tadinya ramai bukan warung remang remang warung yang bener bener itu sepi lagi belum pulih, terus kalau menyalahkan karena yah wajar kalau mau dibeli tawar menawar trus ada efek penyesuaian harga kenaikan harga tanah yang lain naik ga bisa dibeli yah itu harus jadi pertimbangan juga, jangan salah salahin gitu dong ini kan rakyat kita pak bukan rakyat Negara lain rakyat kita, mahal rakyat kita itu.

Saya cuma Wakil Rakyat pak ini rakyat sekarang otoritasnya tinggi pak, Presiden aja dipilih sama rakyat ga bisa macam macam Presiden, Wakil rakyat Anggota Dewan ga bisa macam macam pak, Bupati, Gubernur dipilih oleh Rakyat nah jadi balik lagi itu satu tolong dibuat kebijakan yang bijak pak, ini anak - anak bangsa kita itu ekonomi Pantura itu luar biasa tetangga saya ini Indramayu ni Pak Muttaqin juga senyum senyum aja, mungkin sudah lebih sejahtera Subang, tapi memang transisi Subang dengan makanya itu mau memisahkan diri dari Subang pak.

Subang itu memang terlalu luas, harusnya pecah dua ada Subang Utara karena Bupatinya Kepala Daerahnya konsentrasinya pembangunannya ke Selatan terus, Panturanya ga keurus. Subang ga mau eh Indramayu ga mau ngurus karena bukan wilayah Indramayu. Jadi Subang itu ga itu kondisi luar biasa pak jadi coba dihayatin begitu nah itu satu. Kedua masalah perekrutan tenaga kerja pak, perekrutan tenaga kerja, saya dengar aduan dari masyarakat Subang perekrutan tenaga kerja coba diprioritaskan kan dalam Undang-Undangnya kalau ga salah harus sebagian besar direkrut oleh masyarakat sekitarnya. Jangan dasar kolusi pak obyektifitas supaya bapak juga bisa meredam kalau bapak tidak bisa memberikan harga yang bagus ya dihibur dengan tenaga kerja, CSR-nya banyaklah terintegrasi sinergi dengan Kementerian lain. BUMN aja untuk mensejahterakan kesejahteraan jadi terintegrasi, terkoordinasi antara Kementerian yang satu dengan Kementerian yang lain. Memang ini barang mahal juga sinergi antar Kementerian Bapak juga barang mahal juga susah juga, yah tergantung pemimpinnya mau ga mensinergikan ini nya. Jadi itu pak ya saya minta maaf saya sampaikan begini karena ya bapak juga mendengar realitas di lapangan, kita juga mendengar tinggal disenergikan terima kasih atas perhatian bapak ikhtiarnya, ma kasih pak ketua.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):

Terima kasih Pak Nurhasan, pak dirjen silahkan, pak dirjen *responding* kebijakan - kebijakannya, silahkan pak

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT (Ir. R. AGUS H. PURNOMO):

Terima kasih Bapak, jadi kami terima kasih kepada Bapak-Bapak Pimpinan Komisi V, para anggota yang pada prinsipnya seluruhnya support kami, tadi Pak Daniel yang tentang dengan nelayan kami siap pak dan kawan - kawan ini para pimpronya dibelakang kontraktornya tapi mereka juga sudah kami intruksikan untuk tadi yang Pak Nurhasan sampaikan kita ingin memanfaatkan sumber daya yang di daerah, kami waktu itu minggu yang lalu dengan Pak Menteri Perhubungan dengan Pak Gubernur Jawa Barat kesana. *Plot plotting* -nya akan dengan diatur agar supaya

nanti optimalisasi *resource* yang ada di daerah akan dioptimalkan pak intinya begitu. Bapak atur nanti kami akan disesuaikan dengan jadwal dengan para kontraktor, jadi Pak Hamka tadi terima kasih banyak kami mengikuti prosedur jadi prediksi kami terus terkait dengan tata persoalan sekalian pak. Kami ini terikat dengan regulasi pak, jadi apapun kami ikuti regulasinya jadi yang tadi bisa diakomodir oleh kami adalah kita bisa sampaikan kepada kontraktor para operator itu bisa. Oleh Pak Jhoni terima kasih juga supportnya kami memang berusaha semaksimal mungkin dan obyektif, Pak Bambang Haryo jadi memang untuk tujuh juta .. (bill) itu jangkanya masih Panjang sekali pak sampai 2027, tapi yang akan jalan dalam waktu dekatlah Car terminal pak dan apa namanya dan untuk *general cargo* nanti disana. Jadi memang tahapannya kesana nanti kami akan bicarakan paritbang Perhubungan untuk bicara itu mungkin kalau progresnya dari paket satu untuk yang pelabuhan di laut itu sudah 13%, kemudian AC strutnya memang baru mulai kontraknya 4,7%, kemudian targetnya akhir tahun 2019, dan akhir ini akan selesai semua. Kemudian memang Pak Pimpinan Ketua Komisi V jadi memang benar pak masalah tanah ini memang sangat *krusial* jadi mengganggu bukan mengganggu, menghambat sana sini, saya kira kalau nanti kalau bapak bisa prioritas Komisi II dan yang lain akan sangat tunggu sekali pak, karena ini dimana saja akan terhambat, jadi harapan kami bisa lebih *fair* lebih cepat itunya gitu, terima kasih pak.

KETUA RAPAT F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):

Baik terima kasih Pak Dirjen kalau tidak ada lagi yah, kita bisa langsung satu pada kesimpulan, pak Dirjen saya mengingatkan pak kalau satu yang kita kesimpulan pada saat rapat pembahasan anggaran, salah satunya itu adalah kegiatan kegiatan yang sifatnya sosialisasi pemahaman pemahaman terhadap program program dari perhubungan Laut pak, itu sampai sekarang kita belum dapatkan kegiatannya apa dan sebagainya yang nantinya mengundang para Anggota Komisi V untuk ikut terlibat dalam program sosialisasi. Kan gitu pak itu sampai sekarang kami belum dapat informasinya ini teman teman sekarang sudah banyak di lapangan pak, jadi kalau ada kegiatan kegiatan sosialisasi apakah itu berkaitan dengan *Safety, security* ya untuk masyarakat dan sebagainya yang dilakukan oleh apa namanya Perhubungan Laut itu memang dikomunikasikan, dikoordinasikan dan kita juga minta agendanya jauh jauh hari diinformasikan ke kita pak supaya kita bisa sampaikan kepada Anggota. ya memang kita seringkali dapat undangan, tapi undangannya itu tanpa koordinasi dengan anggota, ya anggota sudah punya kegiatan sudah janji dengan atau sudah ada agenda agenda lain trus kemudian ada undangan yang akhirnya Anggota tidak bisa mengikuti, lagian susah sih itu. Yah untuk itu kita minta tolong dibuat listnya pak itu di daerah mana saja akan dilakukan ini dan itu nah kita minta supaya dikirim ke Komisi V untuk kita bagikan kepada anggota. Sekarang ini kita akan lebih banyak melakukan fungsi Pengawasan kami, kita dilapangan pak sehingga kapan saja pak dirjen dan perangkatnya melakukan kegiatan sosialisasi itu kita bisa hadir untuk Bersama sama memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu yang pertama pak.

Trus yang kedua, kita akan rapat evaluasi 2018 di minggu depan, minggu depan kita mau cek program program yang sudah kita dilakukan di 2018 dan juga di 2019 pak dan saya banyak masukan informasi dari anggota yah ada usulan usulan anggota yang sudah dinyatakan sudah masuk, tapi kita tanya setelah kita dapat satuan tiganya itu malah tidak ada. itu yang seperti ini kita harus yah apa namanya lakukan evaluasi, monitoring sehingga kita tidak hanya mendapatkan penjelasan pada saat pembahasan anggaran tapi juga fungsi kita melakukan pengawasan

setelah satuan tiga itu keluar pak. Itu yang saya sempatkan diluar apa yang kita lakukan pembahasan hari ini.

Baik kita bacakan kesimpulannya, kesimpulan RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan 16 Januari 2016:

1. Komisi V DPR RI mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Patimban, dan berharap agar pembangunan Pelabuhan Patimban dapat menjadi alternatif bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok serta dapat menjadi sarana pengembangan daerah;
2. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan baik pada disaat sebelum sedang maupun sesudah pembangunan Pelabuhan Patimban antara lain terhadap nelayan, petani terdampak;
3. Komisi V DPR RI telah menampung aspirasi masyarakat dan juga telah melakukan kunjungan kerja spesifik terkait permasalahan pembahasan lain lahan penyelesaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undang dan tadi beberapa masukan pak karena itu kita juga cukup banyak CSA, CSR dari para *stakeholder* ya dari Perhubungan Laut ya juga ya kalau memang secara perundang-undangan itu tidak bisa di, sudah dilakukan secara optimal tapi yang berdampak mendapatkan apa ya persoalan persoalan dri pembangunan bisa dikomunikasikan, dikoordinakan dengan dukungan bantuan CSR dan sebagainya termasuk juga sebenarnya dari Kementerian PUPR kita ada program perumahan dan sebagainya kita bisa sampaikan pak, asal itu dikoodinasikan pak sehingga mereka tadi persoalan persoalan yang disampaikan oleh Pak Nurhasan yang langsung dari Dapilnya itu, itu kalau hanya kita terikat dengan peraturan perundang - undangan, ya mereka pasti ada yang merasa tidak adil dan sebagainya sehingga ada perlu pertimbangan pertimbangan khususlah dengan apakah itu dalam bentuk dukungan CSR atau program program lain yang kita bisa dukung untuk paling tidak aspirasi, dukungan kita terhadap mereka yang sudah menyampaikan itu kita tidak lanjut seperti kiita lakukan sekarang pak, saya kira begitu Pak Dirjen apakah kita setuju terhadap kesimpulan ini? setuju pak ya? Anggota setuju? Setuju pak?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih pak dirjen dan juga terima kasih pak direktur atau Pak dari BPN ya pak, Pak Kepala Bidang dari Badan Pertanahan Nasional, terima kasih atas kehadirannya dan silahkan pak dirjen sebelum saya tutup juga pak, pak besok kami ini kunjungan kerja ketiga Provinsi pak saya NTT saya langsung pimpin terus kemana lagi bu Kalimantan Tengah dan malu bukan pak, Ternate ya, ok pak ya tiga Mohon bisa dihadirkan ya terutama para eselon II yang kita kunjungi sebagai obyek kunjungan. Silahkan pak dirjen,

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT (Ir. R. AGUS H. PURNOMO):

Pak Pimpinan Komisi V, Anggota Komisi V yang saya hormati, kami sangat berterima kasih atas dukungannya tadi memang betul kami akan memasukan apa namanya yang bisa dilakukan oleh seperti CSR ataupun yang lain memanfaatkan sumber daya yang didaerah sehingga nanti Insya Allah bisa berikan peluang untuk bagi nelayan, petani maupun masyarakat yang berdampak disana meminimalis

situasi dan ini sudah sekarang ini baru laut pak, nanti kalau sudah pembangunan nanti darat Insya Allah ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):

Wa'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih sekali lagi, saya atas nama Pimpinan dan menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kalau tidak ada hal hal lain yang kita diskusikan, maka kita tutup Rapat Dengar Pendapat kita dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan ucapan

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua, *Salomo*

(RAPAT DITUTUP)